

ABSTRAK

Pelaksanaan otonomi daerah menuntut setiap pemerintah daerah untuk memiliki kemampuan keuangan yang memadai agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara mandiri. Salah satu indikator utama keberhasilan otonomi daerah adalah tingkat kemandirian keuangan daerah yang tercermin dari kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal. Tingkat kemandirian tersebut menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Oleh karena itu, analisis terhadap kemandirian keuangan daerah menjadi penting untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemandirian keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Kupang selama periode tahun anggaran 2014–2023. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) tingkat rasio kemandirian keuangan daerah Kota Kupang, dan (2) tingkat rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Kupang terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi selama periode penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kemampuan fiskal daerah serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan yang lebih berkelanjutan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis laporan keuangan daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kupang selama periode 2014–2023 yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis pendahuluan dan analisis lanjutan. Analisis pendahuluan dilakukan dengan mengkaji perkembangan Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer, dan total pendapatan daerah. Sementara itu, analisis lanjutan dilakukan dengan menghitung rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio ketergantungan keuangan daerah untuk menilai tingkat kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2014–2023, Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang masih rendah sekali dengan kecenderungan meningkat secara nominal, namun kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah dibandingkan dengan pendapatan transfer. Rasio kemandirian keuangan daerah Kota Kupang selama periode penelitian berada pada kategori rendah sekali, yang mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara mandiri masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dalam struktur pendapatan daerah Kota Kupang. Selanjutnya, hasil perhitungan rasio ketergantungan menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan

keuangan daerah Kota Kupang terhadap dana transfer tergolong tinggi hingga sangat tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar pendapatan daerah masih bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan provinsi, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Tingginya ketergantungan ini mengindikasikan bahwa kemandirian fiskal daerah belum sepenuhnya tercapai, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan PAD.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Kupang. Rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah berdampak pada tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer, yang pada akhirnya dapat membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi sumber-sumber PAD melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset daerah secara produktif, serta penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Rasio Ketergantungan.

